

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT PANDANGAN PEMIKIRAN FATIMAH MERNISSI DAN R.A

WOMEN'S LEADERSHIP ACCORDING TO THE THOUGHTS OF FATIMAH MERNISSI AND R.A. KARTINI

Roza¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: zaaroza388@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini tentang kepemimpinan perempuan. Dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), penelitian ini mengkaji bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut tentang kepemimpinan perempuan sebagai seorang pemimpin serta relevansi pemikiran tokoh tersebut terhadap keterlibatan perempuan pada demokrasi pada saat ini. Data dikumpulkan dari karya-karya utama kedua tokoh tersebut, surat-surat pribadi, serta kajian sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan sumber akademik lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemikiran Fatimah Mernissi dan Kartini, keduanya sama-sama menyuarakan pentingnya peran aktif perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam kepemimpinan. Meskipun mereka berasal dari latar sosial dan budaya yang berbeda. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, kedua tokoh ini tidak secara langsung menyatakan perempuan boleh menjadi pemimpin negara maupun masyarakat, namun analisis mendalam terhadap tulisan dan gagasan mereka menunjukkan bahwa mereka sama-sama membuka jalan menuju pengakuan terhadap kemampuan dan legitimasi perempuan untuk memimpin pada tingkatan tertinggi. Pemikiran mereka juga sangat relevan dalam konteks keterlibatan perempuan sebagai pemimpin dalam politik di Indonesia pada demokrasi saat ini. Pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki hubungan yang kuat sebagai pemimpin negara dalam demokrasi saat ini. Keduanya menyoroti pentingnya kesetaraan gender serta pembebasan perempuan dari tradisi patriarki yang menghalangi mereka untuk terlibat di ruang publik, termasuk dalam posisi kepemimpinan politik.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Fatimah Mernissi, R.A Kartini, Gender

Abstract

This study aims to analyze the thoughts of Fatimah Mernissi and R.A Kartini on women's leadership. Using content analysis, this study examines how these two figures think about women's leadership as leaders and the relevance of their thoughts to women's involvement in democracy today. Data was collected from the main works of both figures, personal letters, as well as secondary studies in the form of books, journal articles, and other academic sources. This study also found that Fatimah Mernissi and Kartini both emphasized the importance of women's active role in the public sphere, including in leadership. This is despite the fact that they came from different social and cultural backgrounds. In the context of women's leadership as leaders, neither of these figures directly stated that women could become leaders of the state or society. However, a thorough analysis of their writings and ideas shows that they both paved the way for the recognition of women's abilities and legitimacy to lead at the highest levels. Their ideas are also highly relevant in the context of women's involvement as leaders in politics in Indonesia's current democracy. The ideas of these two figures have a strong connection as leaders of the state in today's democracy. Both emphasize the importance of gender equality and the liberation of women from patriarchal traditions that hinder their participation in public spaces, including in political leadership positions.

Keywords: Women's Leadership, Fatimah Mernissi, R.A. Kartini, Gender

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok serta kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Pemimpin memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan merupakan seni memengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pemimpin dapat menunjukkan dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang disetujui oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat pada situasi tertentu. (Hutahaean, 2020)

Sebelum datangnya Islam, perempuan sangat tidak dihormati bahkan dihina namun setelah adanya Islam muncul derajat seorang perempuan dimuliakan dan diangkat setara dengan laki-laki, masyarakat awam belum bisa menerima dengan adanya kesetaraan gender, masyarakat bukannya tidak menerima tetapi kurangnya informasi mengenai penjelasan kesetaraan gender dalam ranah publik, dalam hal tersebut banyak yang tidak memberi peluang kepada perempuan untuk terjun keranah publik karena apabila perempuan terjun dalam publik dan melebihi kemampuan seorang laki-laki maka argumen ini bisa menjadikan perempuan tersebut diakui dan turut andil dalam kepemimpinan. Perkembangan zaman yang semakin canggih dan banyak hadits yang mendukung seorang perempuan menjadi pemimpin merupakan suatu hal membanggakan bagi seorang perempuan karena haknya untuk terjun langsung keranah publik semakin terbuka. Islam sendiri tidak membedakan perempuan dan laki-laki, baik dalam hal kedudukan, martabat, kemampuan dan kesempatan untuk berkarya serta bertanggung jawab yang suatu saat nanti akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, secara biologis antara perempuan dan laki-laki memiliki jenis kelamin yang sangat jelas berbeda, namun dari sisi hak dan kewajiban sebagai manusia memiliki kesamaan sedangkan dalam hak dan kewajiban mereka sama-sama makhluk Allah SWT. Sebagai seorang perempuan identik dengan sosok yang lemah, halus, emosional, baperan, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki, digambarkan sebagai sosok gagah, pemberani, bertanggungjawab, penggambaran seperti inilah yang membuat posisi perempuan itu sebagai makhluk Tuhan yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. (Azm, 2020)

Kepemimpinan seorang perempuan sebagai pemimpin merupakan topik yang hangat diperbincangkan sejak dahulu, sekarang, dan mungkin seterusnya akan diperdebatkan selama seorang perempuan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Masalah perempuan telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Alasannya sudah jelas,

selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Hal ini dikarenakan peran publik politik perempuan sampai saat ini masih menjadi semacam isu krusial dan sensitiv yang hampir selalu melahirkan pro kontra yang sangat luar biasa, apalagi jika dikaitkan dengan agama yang selama ini banyak kalangan dianggap lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem patriarki yang sebelumnya telah mengakar kuat pada awal proses kelahirannya. (Subhan, 2004)

Belajar tentang perempuan bukan berarti ingin menyaingi, memberontak, tetapi ingin memperjuangkan kesetaraan artinya, tidak dalam misi mengalahkan laki-laki. Terbukti bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri beliau merupakan presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 juli 2001 sampai 20 oktober 2004. Beliau merupakan presiden perempuan Indonesia pertama. Meski kepresidenan Megawati ini tidak lepas dengan politik luar negeri, ada kebijakan politik yang baru dalam pemerintahan Megawati yaitu memulai menjalin dengan adanya kerjasama dengan negara luar yaitu Amerika. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan kinerja proses pendidikan politik dalam masyarakat. Partai politik di Indonesia menurut UU Nomor 2 tahun 2008 yaitu tentang memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam NKRI. (Ramadanti, 2021)

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan prinsip kepemimpinan dan peran perempuan dalam masyarakat. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas kepemimpinan perempuan secara rinci, ada beberapa ayat yang menunjukkan penghargaan terhadap perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan peran aktif perempuan dalam masyarakat adalah Surah An-Nisa (4:34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang salehah adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sebagai mana Allah menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin

dalam keluarga. Ini sering diinterpretasikan sebagai tanggung jawab laki-laki untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan bagi perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kepemimpinan ini tidak berarti dominasi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil dan bijaksana. Secara keseluruhan, ayat tersebut mengandung pesan tentang tanggung jawab, keadilan, dan perlunya saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Interpretasi yang lebih progresif dari ayat ini dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan.

Jika dahulu di masa jahiliah lahirnya perempuan dianggap aib dan tidak jarang dibunuh hidup-hidup, tidak demikian sekarang kondisinya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan memiliki potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Sebagaimana tercantum dalam hadits yang menjelaskan bahwa tidak boleh perempuan menjabat sebagai pemimpin dan larangan menjadikan perempuan sebagai pemimpin, hadits tersebut yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ)

Artinya: “Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, berkata: tatkala sampai berita kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bahwa penduduk persia telah mengangkat anak perempuan kiswa sebagai raja, beliau berkata : takkan pernah jaya suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin”. (HR.Bukhari : 4425)

Dari hadits di atas jelas bahwa setiap kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan tidak akan beruntung. Meski banyak pendapat yang mengatakan hadits tersebut sebagai argument untuk menggusur kaum perempuan dari dunia kepemimpinan. Ada pula kelompok yang menolak terhadap pemakaian hadits tersebut dengan alasan bahwa perempuan berhak terjun ke dunia kepemimpinan. Hadits di atas seringkali dipahami bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan dari laki-laki. (Wahyuni, 2018)

Isu tentang kepemimpinan perempuan, terutama dalam posisi penting seperti pemimpin negara, terus menjadi topik yang hangat di diskusikan baik secara global maupun lokal. Meskipun zaman telah mengalami perubahan, anggapan yang meragukan kemampuan serta legitimasi perempuan untuk memimpin negara masih sangat kuat, khususnya di masyarakat yang dikuasai oleh nilai-nilai patriarkal dan tafsir agama yang konservatif. Perempuan sering dianggap tidak pantas menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan karena

dianggap kurang rasional, terlalu emosional, dan tidak memiliki ketegasan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh perempuan telah berhasil memimpin negara, baik di negara-negara Barat maupun di negara-negara Muslim. Di tengah berbagai perdebatan ini, menjadi penting untuk menjelajahi dan memahami kembali akar ideologis dan filosofis yang mendasari penolakan maupun dukungan terhadap kepemimpinan perempuan.

Dalam pemikiran Islam, Fatimah Mernissi adalah salah satu feminis Muslim modern yang dengan tegas menyampaikan kritik terhadap sistem patriarki yang sudah kuat dalam masyarakat Muslim. Mernissi berpendapat bahwa batasan yang diberlakukan terhadap perempuan tidak semata-mata berasal dari ajaran Islam, melainkan hasil dari interpretasi yang didominasi sepanjang sejarah. Melalui pendekatan kritis terhadap teks-teks agama, Mernissi membuktikan bahwa Al-Qur'an dan sejarah awal Islam tidak menolak keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Beliau mengeksplorasi sejarah perempuan dalam Islam, seperti Ratu Bilqis, dan menyoroti konstruksi hadits yang sering digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan. Bagi Mernissi, soal kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan dan moralitas, bukan tentang jenis kelamin. (Mernissi, 1994)

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia yang lebih lokal dan kultural, R.A Kartini sebagai tokoh emansipasi perempuan yang sangat berpengaruh dalam membangun wacana kesetaraan gender di tanah air. Kartini hidup di era kolonial Belanda, di mana perempuan khususnya dari kalangan priyayi, mengalami pembatasan oleh tradisi dan budaya yang menutup akses mereka terhadap pendidikan dan partisipasi di ranah publik. Meskipun beliau tidak secara khusus membahas kepemimpinan perempuan dalam politik, ide-ide Kartini mengenai kebebasan berpikir, hak atas pendidikan, dan pentingnya kemandirian intelektual perempuan menjadi dasar yang signifikan bagi lahirnya gerakan perempuan di Indonesia. Kartini menekankan perlunya suara perempuan untuk masa depan bangsa, yang secara implisit mengandung gagasan bahwa perempuan juga berhak untuk menjadi pemimpin, termasuk di tingkat negara. (Kusuma, 2022)

Menarik untuk dikaji, baik Fatimah maupun Kartini hidup dalam masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah. Namun, melalui ide-ide dan tulisan mereka, keduanya mampu melampaui batas struktur sosial di zaman mereka. Mernissi berbicara dari konteks masyarakat Muslim Arab pascakolonial yang terikat dalam konservatisme religius, sementara Kartini bersuara dari dalam sistem feodal dan kolonial Hindia Belanda yang mengesampingkan peran perempuan. Menganalisis pemikiran kedua tokoh ini menjadi penting karena memberikan wawasan lintas budaya tentang bagaimana perempuan, melalui intelektualitas mereka, dapat mengubah wacana sosial dan menentang ideologi yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan.

Jurnal yang ditulis oleh Aرسال dkk tentang Kepemimpinan Perempuan:

Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud dalam jurnal Al Qudus jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits volume 4, Nomor 2 tahun 2020. Dalam jurnal tersebut tafsir hermeneutika feminisme tersebut dilatar belakangi dengan kehidupan yang pernah dialami (diskriminatif), didukung dengan gerakan aktivis yang diikutinya. Maka dari itu beliau pun menolak tafsiran yang tidak setuju kepada perempuan, karena menurutnya kepemimpinan bukan hanya untuk laki-laki, melainkan perempuan mampu memimpin karena dalam Al-Qur'an tidak ada larangan dan penafsiran ayat yang belum pasti, dalam memperjuangkan hak perempuan masih terbuka luas untuk tidak memunculkan perilaku penindasan terhadap kaum perempuan di berbagai belahan dunia. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah, penelitian sebelumnya membahas kepemimpinan perempuan penerapan metode tafsir hermeneutika feminisme amina wadud, sedangkan penelitian ini berusaha memaparkan tentang kepemimpinan perempuan menurut pandangan pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini.

Jurnal yang ditulis oleh Kholila Mukaromah dengan judul Hermeneutika Hadits Fatimah Mernissi (Aplikasi terhadap Hadits Kepemimpinan Perempuan), jurnal Universum Volume 12 Nomor 1 Januari 2020. Dalam jurnal tersebut penggunaan hermeneutika sebagai sebuah pendekatan dalam studi hadits menjadi salah satu bentuk dari integrasi keilmuan yang digencarkan pada era kontemporer. Dalam jurnal ini membahas salah satu hadits yang dikaji ulang oleh Mernissi yaitu riwayat Abu Bakrah yang meriwayatkan hadits terkait kepemimpinan perempuan. Menurut Mernissi, riwayat Abu Bakrah tentang kepemimpinan perempuan harus ditolak dikarenakan pribadi Abu Bakrah yang diketahui memiliki rekam jejak yang buruk. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah, penelitian sebelumnya membahas salah satu hadits yang meriwayatkan tentang kepemimpinan perempuan, sedangkan penelitian ini berusaha memaparkan tentang kepemimpinan perempuan menurut pandangan pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini.

Skripsi yang ditulis oleh Husniatul Jauhariyah tentang "Perempuan Sebagai Kepala Negara Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi" Jurusan Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Skripsi tersebut membahas terkait perbedaan pemikiran Fatimah Mernissi dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang perempuan sebagai kepala negara. Pada penelitiannya memiliki tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu untuk memetakan persamaan dan perbedaan konstruksi-konstruksi dari pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qaradawi serta menemukan faktor hal yang melatarbelakangi pemikiran para tokoh tersebut. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Husniatul Jauhariyah yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kepemimpinan perempuan.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat banyak perbedaan salah satunya terletak pada bagian tokoh yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan itu mencantumkan tokoh Fatimah Mernissi dan R.A Kartini, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husniatul Jauhiriyah menggabungkan pemikiran dua tokoh, yaitu Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qardawi.

Skripsi yang ditulis oleh Tina tentang “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam Studi Pemikiran Fatimah Mernissi” Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alaudin Makasar tahun 2023. Skripsi ini membahas terkait bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam serta pandangan Fatimah Mernissi tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam. Pada penelitiannya memiliki tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam serta pandangan Fatimah Mernissi tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Tina yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kepemimpinan perempuan menurut pandangan Fatimah Mernissi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya hanya terletak pada teori yang digunakan pada penelitian tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Dita Dwi Oktaviana tentang “Studi Analisis Peran Perempuan Dalam Islam (Pemikiran Fatimah Mernissi)” Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Perwokerto, tahun 2024. Skripsi tersebut membahas terkait peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial menurut Fatimah Mernissi. Pada penelitiannya memiliki tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam berbagai bidang menurut Fatimah Mernissi. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Dita Dwi Oktaviana yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang studi pustaka pada pemikiran suatu tokoh sedangkan perbedaannya hanya terletak pada apa yang hendak diteliti, yang mana penulis menggunakan dua pemikiran tokoh sekaligus yaitu pemikiran dari Fatimah Mernissi dan R.A. Kartini, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya mengkaji satu pemikiran saja yaitu pemikiran dari Fatimah Mernissi. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan beranggapan seorang perempuan bisa menjadi pemimpin karena dalam Islam sendiri tidak ada larangan perempuan untuk memimpin suatu kaum selama bisa mengemban amanah yang diberikan dan tidak melanggar syariat Islam serta kodratnya sebagai seorang perempuan, namun sebagian ulama tidak setuju sebab berpatokan dengan hadits misoginis yaitu hadits yang mengandung kesan benci terhadap kaum perempuan. Sehingga penulis lebih tertantang untuk meneliti bagaimana sebenarnya kepemimpinan seorang perempuan menurut pandangan pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau biasa disebut studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Library research (penelitian pustaka) yaitu suatu jenis penelitian yang berpedoman pada penelusuran dan pengolahan data yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang pada akhirnya mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian, serta pengumpulan data dengan cara menggali teori yang bersumber melalui buku-buku, jurnal-jurnal, kitab, artikel dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian tersebut.

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori, mengkaji konsep, atau menganalisis hasil penelitian terdahulu secara kritis. Library research atau studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Sari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini tentang Kepemimpinan Perempuan

Konsep dasar yang menjadi semangat dari Al-Qur'an ketika berbicara hubungan laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan bahwa kedua jenis kelamin ini masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan pengembangan diri termasuk dalam aspek kepemimpinan. Setiap Muslim dalam pandangan Islam merupakan pemimpin dan kepemimpinan akan dimintai pertanggung jawaban. Kepemimpinan perempuan dalam Islam menjadi perdebatan ketika berkaitan kepemimpinan pada aspek yang lebih luas yaitu berkaitan dengan kepemimpinan pada ranah publik khususnya kepemimpinan politik. Sebagian

menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pada wilayah publik, pandangan sebaliknya menyatakan bahwa perempuan diperkenankan berpartisipasi dan menjadi pemimpin dalam wilayah publik seperti kaum laki-laki.

Salah satu esensi ajaran Islam adalah kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Pembeneran pokok yang membanggakan umat Islam, khususnya kaum perempuan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW pejuang paling gigih untuk meningkatkan martabat kaum perempuan. Esensi paling dasar dari emansipasi perempuan sudah tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau, hampir 15 abad yang lalu. Al-Qur'an tidak hanya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan benar-benar setara dalam pandangan Allah, tapi juga bahwa mereka merupakan anggota-anggota dan pelindung antara satu sama lain. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak menciptakan hierarki-hierarki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan sebagaimana dilakukan oleh banyak perumus tradisi nasrani. Al-Qur'an juga tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk-makhluk yang setara. Meskipun Al-Qur'an menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan, namun kenyataannya masyarakat Muslim pada umumnya tidak pernah menganggap laki-laki dan perempuan setara, terutama dalam konteks perkawinan (*Al Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar penolakan masyarakat Muslim terhadap gagasan kesetaraan laki-laki-perempuan berakar pada keyakinan bahwa perempuan lebih rendah dalam asal usul penciptaan karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dalam hadits Rasulullah SAW juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ
كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ”

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka

dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut adalah sahih dan diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta hadits ini memiliki beberapa makna penting terkait dengan bagaimana memperlakukan perempuan. Hadits ini berisi wasiat atau pesan penting terkait bagaimana memperlakukan perempuan. Maksudnya adalah bahwa perempuan memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan laki-laki. Tulang rusuk yang bengkok melambangkan bahwa perempuan memiliki emosi dan perasaan yang lebih lembut serta cenderung tidak mudah diluruskan. Oleh karena itu, laki-laki harus memahami dan menerima perbedaan ini. Pesan utama dari hadits ini adalah agar para laki-laki senantiasa berbuat baik dan lemah lembut kepada perempuan. Perlakukanlah perempuan dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan kesabaran..

Superioritas laki-laki terhadap perempuan yang meresap ke dalam tradisi Islam tidak saja didasarkan pada kepustakaan Hadits, tapi juga pada interpretasi ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Akibat dari hasil pemahaman para ulama, yang oleh umat Islam dianggap suatu kebenaran mutlak, maka kaum perempuan selalu dipandang *inferior*, direndahkan, dikucilkan, dan dibatasi wilayah gerakannya menjadi sangat sempit. Hal ini, hingga saat ini masih terjadi dan eksis dalam masyarakat Muslim, sebagaimana dikemukakan Mernissi dari hasil pengamatannya terhadap kedudukan perempuan Muslim di Maroko, agaknya mewakili apa yang berlaku dalam umat Islam secara umum. Dalam bukunya *Beyond the Veil*, Mernissi mengungkapkan bahwa salah satu ciri khas masyarakat Muslim dalam masalah seksualitas adalah adanya pembatasan wilayah yang mencerminkan pembagian kerja yang khas dan konsepsi tentang masyarakat dan kekuasaan yang khas.

Adapun ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan perempuan dalam surah An-Naml ayat 23-24:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَانَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

23. *“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.*

24. *“Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk”.*

Ayat ini menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah negara, yaitu Ratu Balqis dan kaumnya bernama kaum Saba. Pada ayat ini dijelaskan tentang Ratu Balqis yang memiliki kekuasaan luar biasa tetapi ia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah melainkan menjadi penyembah matahari.

Kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin adalah isu yang mengundang perdebatan dan kajian mendalam. Salah satu pemikir yang merintis pemahaman ini adalah Fatimah Mernissi seorang intelektual asal Maroko yang dikenal dengan karya-karyanya yang mencurahkan perhatian kepada isu perempuan dalam Islam. Pemikiran Mernissi ini memberikan wawasan yang berharga terkait peran perempuan dalam kepemimpinan politik, menghubungkannya dengan prinsip-prinsip agama Islam, dan mengeksplorasi sejauh mana sejarah Islam mendukung atau membatasi partisipasi pemerintahan.

Pemikiran Fatimah Mernissi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam didasarkan pada interpretasi kritis terhadap teks-teks agama dan tradisi Islam. Beliau menunjukkan bahwa dalam Al-Qur’an, tidak ada larangan eksplisit terhadap perempuan untuk memimpin negara atau masyarakat. Sebaliknya, Mernissi menyoroti bahwa dalam banyak kasus, Nabi Muhammad mendengarkan nasihat perempuan dan mengambil keputusan berdasarkan kemauan mereka. Ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam sebenarnya mendukung keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan kepemimpinan.

Dalam bukunya yang berjudul *Wanita di Dalam Islam*, Mernissi telah menjelaskan dengan menganalisis hadits tentang kepemimpinan perempuan.

Salah satu hadits nya adalah hadits Bukhari, Abu Bakrah pernah mendengar Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَرِهْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Shahabat Abi Bakrah ia berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kemanfaatan kepadaku dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah, pada peristiwa perang Jamal, sesudah hampir saja aku bertemu dengan ashhab al-jamal (anggota pasukan yang di antara mereka terdapat Ummul Mukminin Aisyah yang mengendarai unta/jamal, yang melawan khalifah Ali), untuk kemudian aku bergabung berperang bersama mereka". Ia berkata, "Ketika sampai kepada Rasulullah kabar tentang pengangkatan puteri Kisra menjadi ratu (pada imperium Persia), beliau bersabda, "Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita".

Di dalam buku nya yang berjudul "Wanita di Dalam Islam" menjelaskan dengan menganalisis tentang kepemimpinan perempuan adalah salah satu hadits Bukhari, Abu Bakrah pernah mendengar Rasulullah berkata: "Barang siapa yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita, mereka tidak akan pernah memperoleh kemakmuran".

Beliau menjelaskan bahwa hadits tersebut termasuk dalam Shahih yang berisi ribuan hadits otentik yang diterima oleh Bukhari sehingga dianggap benar dan oleh sebab itu tidak bisa dibantah tanpa bukti, karena hadits merupakan wilayah kajian ilmiah.

Jadi, tidak ada halangan bagi saya, sebagai seorang Muslimah untuk melakukan penyigian ganda secara historis dan metodologis. Mengenai hadits ini dan perawinya, terutama, dalam kondisi bagaimanakah hadits ini pertama kali diucapkan. Siapa yang mengucapkan hadits ini, di mana, kapan, mengapa dan kepada siapa.

Mernissi menjelaskan didalam bukunya siapa itu Abu Bakrah. Abu Bakrah adalah seorang sahabat yang mengenal Rasulullah semasa hidup beliau, dan

bergaul cukup lama, sehingga memungkinkannya bisa melaporkan hadits tersebut.

Menurutnya, Rasulullah mengatakan hadits itu setelah mengetahui bahwa bangsa Persia diperintah oleh seorang perempuan. "Ketika Kisra wafat, Rasulullah ingin mengetahui kabar itu dan bertanya: "Dan siapa yang telah menggantikannya sebagai pemimpin?" Jawabannya adalah: "Mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada puterinya. Saat itulah menurut Abu Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang wanita.

Pada tahun 628 M, terjadinya peperangan berkepanjangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Barangkali kejadian inilah yang disinggung oleh Abu Bakrah, karena akibat peperangan tersebut gugurnya putra Khusraw bangsa Persia yang berlangsung pada tahun 629-632 M. (Mernissi, Wanita di Dalam Islam , 1994)

Mungkinkah insiden ini yang menyebabkan Rasulullah mengucapkan hadits yang menentang (kepemimpinan) perempuan tersebut? Bukhari tidak melacak sejauh itu, ia hanya melaporkan kata-kata Abu Bakrah, yaitu isi hadits itu sendiri dan rujukan mengenai seorang perempuan yang menjadi penguasa bangsa Persia.

Hadits yang berbunyi: *"Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang perempuan."* Diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu dan tercatat dalam beberapa kitab hadits utama, di antaranya Shahih al-Bukhari (No. 4425, 7099), Sunan At-Tirmidzi (No. 2262), Sunan An-Nasa'i (No. 5388), Musnad Ahmad (No. 19796, 20414). (Katimin, 2018)

Hadits ini sahih, karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, yang merupakan kitab hadits paling autentik setelah Al-Qur'an. Hadits ini disampaikan Rasulullah SAW ketika mendengar berita bahwa Putri Kisra (Buwaran binti Syairawaih) diangkat menjadi penguasa Kekaisaran Persia setelah ayahnya terbunuh.

Menurut Mernissi hal yang perlu dipertanyakan adalah mengapa hadits ini diungkapkan oleh Abu Bakrah, ketika Aisyah mengalami kekalahan dalam perang Jamal. Perang Jamal merupakan perang yang terjadi di Basra, Irak pada tahun 656 Masehi, antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib (sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad) dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, Istri dari Nabi Muhammad yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu yaitu Utsman bin Affan. Pada saat perang terjadi, istri Nabi SAW, yakni Aisyah yang menjadi pemimpin perang. Perang Jamal disebut juga Perang Unta, yang terjadi antar kaum Muslimin untuk pertama kalinya. Dalam penjelasannya, Mernissi mengatakan bahwa Abu Bakrah mengemukakan hadits tersebut ketika beliau menolak untuk ikut andil dalam perang saudara antara Aisyah dan Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan, ketika Abu Bakrah dihubungi oleh Aisyah, secara terbuka ia menyatakan sikap menentang fitnah. Abu Bakrah menjawab:

Adalah benar anda Ummi kami (Ibu kaum beriman), adalah benar bahwa orang semacam anda memiliki hak atas kami. Tetapi saya mendengar Rasulullah berkata: “barangsiapa menyerahkan kekuasaan kepada seorang perempuan, mereka tidak akan pernah sejahtera”.

Namun demikian, ketika itu banyak sahabat dan penduduk Basrah yang tidak memihak dalam konflik tersebut, hanya saja ketika itu Abu Bakrah membenarkan sikap mereka dengan mendasarkan bahwa salah satu dari yang bertikai adalah perempuan.

Namun, Mernissi juga menyoroti bahwa selama sejarah Islam. Pemahaman tentang peran perempuan dalam kepemimpinan telah diinterpretasikan ulang dengan cara yang menghambat perempuan. Hal partisipasi terutama ini disebabkan oleh budaya patriarki yang mendasari banyak masyarakat Muslim. Mernissi menilai bahwa banyak larangan terhadap perempuan dalam kepemimpinan tidak berdasarkan ajaran Islam yang asli, tetapi lebih kepada tradisi dan norma sosial yang berkembang. Pemikiran Mernissi juga menggali

pandangan-pandangan yang beragam dalam dunia Islam terkait kepemimpinan perempuan. Beberapa masyarakat dan ulama Islam telah lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, sementara yang lain tetap mempertahankan pandangan konservatif.

Pemikiran Mernissi mendorong kita untuk mempertimbangkan ulang bagaimana masyarakat Muslim menggabungkan nilai-nilai dapat agama dengan aspirasi kesetaraan gender dalam konteks politik kontemporer. Dalam kesimpulan pemikiran Fatimah Mernissi tentang kepemimpinan perempuan memberikan kontribusi yang berharga dalam membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini. Ini bukan hanya tentang menggali prinsip-prinsip Islam, tetapi juga tentang merenungkan kembali bagaimana budaya dan tradisi telah memengaruhi pandangan terhadap perempuan dalam kepemimpinan. Mernissi memicu perdebatan yang penting tentang peran perempuan dalam pemerintahan dan membantu masyarakat Muslim untuk memikirkan ulang dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang ada dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik.

Di dalam buku karya Fatimah Mernissi yang berjudul *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* Mernissi menjelaskan bahwa di dunia Arab, Yaman mempunyai keistimewaan, bukan karena banyaknya kaum perempuan yang memegang tampuk kekuasaan politik disana, melainkan karena dua orang di antara mereka, yaitu Malika Asma dan Malika' Arwah, yang memiliki hak istimewa dan kriteria mutlak sebagai pemimpin. Tak seorang perempuan Arab pun yang memperoleh penghormatan seperti di negeri Arab mana pun setelah kedatangan Islam.

Mernissi juga menjelaskan pada buku nya yaitu tentang teka-teki tentang "Apakah Benazir Bhutto yang Pertama?", beliau tidak bermaksud untuk memecahkan teka-teki itu, melainkan untuk membicarakan ambiguitas yang menggantung di atas hak-hak politik kamu perempuan Muslim.

Beliau pun tidak berusaha untuk menetapkan apa yang telah jelas di mata orang-orang yang berpikiran adil, kaitannya misterius antara kelangsungan

hidup dari hak-hak laki-laki dan tidak dilangarnya hak-hak kaum perempuan.

Sebagai seorang perempuan Muslim yang baik dan taat, saya akan menyerahkan permasalahan serius itu kepada kaum laki-laki. Saya menyadari tempat saya, saya hanya akan membahas apa yang merupakan urusan saya, dan apa yang lebih sepele daripada menyelidiki para perempuan yang tak pernah ada. Bermain sebagai detektif, terutama detektif pribadi bukanlah kegiatan yang terlalu serius. Beralih menjadi detektif pribadi ketika pihak yang berwenang tidak mau menerima kasus ini. Dan jelas beginilah situasi para ratu ini. Tak seorang pun di dunia Muslim yang luas ini pernah memikirkan tentang nasib mereka. Tidak ada pihak berwenang yang mempedulikan mereka. Lebih jauh lagi, apakah kita punya bukti, yang paling kecil saja, tentang keberadaan mereka?. Alternatif-alternatifnya sederhana saja, entah para perempuan pemimpin negara itu memang tidak pernah ada, dalam hal ini para politisi yang menegaskan bahwa Benazir Bhuto sebagai yang pertama adalah benar. Atau di masa lalu telah ada perempuan yang memimpin negara-negara Muslim, tetapi telah dihapuskan dari sejarah resmi

Sebenarnya, ada tiga pandangan tentang kepemimpinan politik perempuan dalam Islam.

1. Pendapat pertama melihat perempuan tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 288:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨٨﴾

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak

untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah mahaperkasa lagi mahabijaksana”.

Serta larangan perempuan untuk keluar rumah terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 33, dan hadits di atas juga merupakan argumen dari pendapat pertama ini.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Tetaplah (tinggal) dirumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan sebersih-bersihnya”.

2. Pendapat kedua dari sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang perempuan memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْفِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Alasan pendapat yang kedua bahwasanya perempuan untuk berpartisipasi dalam wilayah politik. Sejarah membuktikan bahwa Ratu Bilqis telah sukses memerintah Saba' terdapat pada surah Al-Naml ayat 34:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dia (Balqis) berkata: sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakan dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat.

3. Pendapat ketiga memandang perempuan berhak berpolitik seperti laki-laki, termasuk memegang pucuk pemerintahan. Pendapat ini juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis, serta realita suksesnya beberapa pemimpin dunia dari kalangan perempuan seperti Margareth Teacher, Indira Gandhi, Syajaratuddur yang menghalau tentara salib masuk Mesir. Bahkan kerajaan Aceh Darussalam pernah dipimpin oleh perempuan. Mereka berpendapat juga bahwasannya wilayah al-uzhama dulu bermakna pemimpin tertinggi baik kenegaraan dan agama seperti menjadi imam salat dan khatib. Namun setelah tumbangnya Khilafah Utsmaniyyah, sistem kenegaraan mengalami pergeseran. Ada pembagian tugas yang membantu wali, seperti parlemen, menteri menteri, sehingga perempuan juga boleh menduduki posisi tertinggi karena tidak ada tuntutan untuk menjadi Imam salat ataupun khatib. Pendapat ketiga yang dianut sebagian besar ulama kontemporer ini menginterpretasikan hadits Abu Bakrah di atas, ditujukan secara khusus untuk bangsa Persia, yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan, bukan dipukul rata untuk semua kaum perempuan.

Dengan demikian hadits tersebut juga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melarang kaum perempuan sebagai pemimpin, karena kekhususan sifat hadits tersebut. Fatimah Mernissi, salah seorang pemikir Muslim kontemporer sependapat dengan para pemikir Muslim kontemporer lainnya yang menganggap bahwa tidak satu pun ayat atau hadits yang melarang kaum perempuan sebagai pemimpin. Terhadap hadits (riwayat sabahat Abu Bakrah tersebut diatas), yang sering dijadikan alasan sebagian ulama untuk melarang kaum perempuan

sebagai pemimpin. Mernissi memberikan kritik yang terletak terhadap kesahihan hadits tersebut. Selain sifat hadits tersebut yang bersifat “khusus”.

Mernissi meragukan kredibilitas Abu Bakrah sebagai periwayat hadits dari Nabi, dalam biografinya Abu Bakrah pernah di hukum dan dicambuk oleh kholifah Umar bin Khattab karena memberikan “kesaksian palsu” berkaitan dengan tuduhan zina terhadap salah satu sahabat dan politikus terkemuka, yakni Al-Mughirah bin Shu’bah”.

Alasan lain mengapa Mernissi tidak bisa menerima hadits tersebut sebagai hujjah, karena hadits tersebut dipandang bertentangan dengan semangat Al-Qur’an yang justru memberikan gambaran betapa perempuan bisa menjadi pemimpin yang mampu membawa rakyatnya ke dalam kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram. Mernissi menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah kitab suci yang didasarkan kepada wahyu. Oleh karena itu lebih superior (tinggi tingkatannya) jika dibandingkan dengan hadits yang manapun. Oleh karena itu setiap pertentangan antara keduanya harus diselesaikan dengan memprioritaskan kepada tingkat kesakralan yang lebih tinggi. Akibatnya, seperti dalam kasus ini, setiap hadits yang menentang hak-hak perempuan untuk berkuasa dianggap ketinggalan zaman, kuno dan usang oleh serangkaian ayat yang menguraikan tentang kebijaksanaan Ratu Sheba.

Kepemimpinan perempuan dalam pemikiran Fatimah Mernissi penulis setuju dengan pemikiran Fatimah Mernissi yang mengatakan bahwa perempuan sebagai pemimpin boleh saja menjadi seorang pemimpin sebuah negara maupun masyarakat. Namun, tetap harus memperhatikan tugas utama dalam menjalankan kewajiban utamanya sebagai seorang istri atau pun sebagai ibu dalam rumah tangganya. Selain itu, dalam tatanan Islam pun, harus tetap memperhatikan bagaimana Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan jika dalam suatu organisasi atau sekumpulan orang.

Namun, jika dikembalikan dari hadits Rasulullah dalam hal siapa yang lebih berhak menjadi pemimpin. Maka jika ada laki-laki yang lebih baik dalam

memimpin untuk umat Islam, maka laki-laki lebih baik menjadi seorang pemimpin daripada perempuan. Namun penulis tidak setuju di mana Fatimah Mernissi mengkritik hadits sahih yang diriwayatkan Abu Bakrah yang menurutnya merupakan hadits misoginis di mana hadits tersebut menentang kepemimpinan perempuan, karena setiap apa yang disampaikan Rasulullah berasal dari taufik Allah SWT seperti pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam Islam yang berlaku untuk seluruh umat Islam yang tidak hanya dikhususkan pada kondisi itu saja.

Gambar 1. Foto Fatimah Mernissi



Gambar 2. Foto R.A. Kartini



Jika dibandingkan dengan kondisi perempuan dewasa dengan ketika memasuki periode sebelum abad ke-20. Kedudukan kaum perempuan benar-benar sangat berbeda. Sekarang kaum perempuan bisa dengan bebas melakukan berbagai aktivitas di berbagai ruang publik tanpa adanya pandangan buruk yang menghantui. Wujud dari kebebasan tersebut adalah dalam hal memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta menduduki jabatan-jabatan penting serta partisipasi politik. Sebelum mendapatkan pendidikan peran perempuan pada masa saat itu

masih bertalian erat dengan tugas perempuan yang mengurus rumah tangganya. Kondisi serupa juga terjadi di seluruh belahan wilayah di Indonesia yang mana secara adat perempuan memiliki keterbatasan dalam memperoleh hak-haknya. Dari berbagai tokoh-tokoh penggerak gerakan perempuan, R.A. Kartini merupakan salah satu pionir dalam hal tersebut. Pemikiran dari Kartini tidak hanya memiliki implikasi besar sebagai inspirasi bagi tokoh-tokoh lainnya untuk memperbaiki kehidupan perempuan pasca 1904.

Pendidikan dan nasionalisme merupakan suatu dua elemen yang membentuk identitas suatu bangsa. Di Indonesia, R.A. Kartini adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam membentuk identitas bangsa. Sejak abad ke-19, Kartini dikenang sebagai pahlawan emansipasi perempuan di Indonesia yang mengutamakan perjuangannya pada nilai-nilai pendidikan dan semangat nasionalisme. Perjuangan seorang Kartini di dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan emansipasi perempuan. Kartini juga dikenal karena pemikirannya yang sangat kritis dan perjuangannya yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama melalui pendidikan. Pemikiran Kartini tentang pentingnya pendidikan merata bagi perempuan tidak hanya tentang keadilan sosial, tetapi juga menyoroiti esensi kesetaraan gender.

Kartini tidak hanya berusaha untuk membebaskan kaum perempuan dari tradisi yang sangat mengikat, tetapi Kartini juga memiliki tekad untuk memajukan bangsanya. Kartini hidup pada masa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di tengah masyarakat Jawa yang sangat patriarkal dan di bawah sistem kolonial Belanda. Saat itu, perempuan khususnya perempuan pribumi tidak memiliki akses luas terhadap pendidikan, hak politik, atau jabatan kepemimpinan. Perempuan dianggap hanya cocok berada di ranah domestik, mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak. Kondisi ini membuat Kartini merasa gelisah dan tidak puas, terutama ketika beliau melihat bahwa perempuan di Barat (yang beliau ketahui lewat bacaan dan surat-menyurat) sudah mulai mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk terlibat dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Kartini meyakini bahwa pentingnya pendidikan bagi perempuan harus diprioritaskan karena perempuan memegang peran kunci

sebagai pendidik utama dalam membentuk karakter anak-anak.

Kartini merupakan tokoh emansipasi perempuan Indonesia yang pemikirannya melampaui zamannya. Beliau hidup di masa ketika perempuan, khususnya perempuan Jawa hidup dalam batasan adat dan budaya patriarki yang sangat kuat. Melalui surat-surat yang ditulis kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, Kartini mengungkapkan kegelisahan, harapan, serta pemikiran kritisnya tentang peran perempuan dalam masyarakat. Salah satu gagasan penting yang dapat kita tarik dari tulisannya adalah keyakinannya bahwa perempuan memiliki hak dan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kartini tidak secara langsung menyebut perempuan sebagai presiden atau kepala negara karena konteks zaman kolonial saat itu belum memungkinkan politik semacam itu. Namun, beliau menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka bisa berpikir bebas, mengambil keputusan sendiri, dan menjadi individu yang mandiri. Dalam surat-suratnya, beliau menunjukkan bahwa jika perempuan diberi pendidikan yang setara dengan laki-laki, maka mereka juga akan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memimpin. Menurut Kartini, perempuan bukan hanya pelengkap laki-laki dalam rumah tangga, melainkan memiliki peran penting dalam menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan bermoral. Dalam pandangannya, perempuan yang cerdas akan melahirkan dan mendidik anak-anak yang cerdas pula. Namun, beliau juga menyadari bahwa perempuan harus diberi ruang untuk terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bahkan menjadi pemimpin.

Kartini menyatakan bahwa keinginan perempuan untuk mandiri dan berkembang bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk bangsa. Dengan kata lain, beliau memandang bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan sosial. Perempuan yang berpikir maju dan berani mengambil peran publik memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masyarakat, termasuk menjadi pemimpin negara jika mereka diberi kepercayaan dan kesempatan. Dalam banyak suratnya, Kartini mengungkapkan kekagumannya terhadap perempuan-perempuan Eropa yang terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Beliau berharap perempuan Indonesia suatu saat

bisa memiliki kebebasan yang sama. Kekaguman ini memperlihatkan bahwa Kartini membayangkan suatu masa depan di mana perempuan Indonesia tidak hanya berada di belakang layar, tetapi juga berada di garis depan, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Bagi Kartini, pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga sarana pembebasan. Dengan pendidikan, perempuan dapat berpikir kritis, memahami situasi sosialnya, dan memiliki bekal untuk berpartisipasi dalam kehidupan bangsa. Gagasan ini sangat relevan dalam konteks kepemimpinan, karena seorang pemimpin harus memiliki wawasan, integritas, dan kemampuan berpikir strategis dalam hal-hal yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang baik.

Kartini juga menolak pandangan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tidak mampu mengambil keputusan besar. Beliau menunjukkan bahwa ketidakmampuan perempuan bukan karena kodrat, tetapi karena ketidakadilan sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Dengan demikian, jika sistem sosial diubah dan perempuan diberi peluang yang sama, maka mereka bisa mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan sekalipun. Pemikiran Kartini juga memperlihatkan sikap progresif terhadap peran gender. Beliau tidak membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kekuatan fisik atau peran tradisional, melainkan berdasarkan potensi dan kualitas individu. Dalam pandangannya, kepemimpinan bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kemampuan, moralitas, dan pendidikan seseorang. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep kepemimpinan modern yang menekankan keadilan gender. Dengan menanamkan semangat emansipasi dan pemberdayaan perempuan, Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam berbagai bidang. Gagasan-gagasannya menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan di Indonesia untuk terus memperjuangkan hak politik, termasuk hak untuk dipilih sebagai pemimpin. Keterpilihan seorang perempuan menjadi kepala negara seperti Megawati Soekarnoputri adalah bukti bahwa cita-cita Kartini bukan sesuatu yang mustahil.

Meskipun Kartini tidak secara eksplisit menuliskan pendapat tentang perempuan sebagai pemimpin, gagasan besarnya sangat jelas, beliau

memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan, kebebasan berpikir, dan peran dalam masyarakat. Pemikiran emansipasi perempuan dalam pandangan Kartini tercermin dalam bukunya yang terkenal, “Habis Gelap Terbitlah Terang”, yang berisi kumpulan surat Kartini kepada teman-teman Belandanya. Dalam kumpulan surat tersebut, bahwa Kartini telah banyak membicarakan tentang kepeduliannya terhadap hak dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Dalam suratnya kepada Estelle Zeehandelaar, Kartini menulis:

“Apakah hanya kaum laki-laki yang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan kemajuan? Bukankah perempuan juga manusia yang berpikir, merasakan, dan punya cita-cita?”

Dari tulisan beliau dapat disimpulkan bahwa Kartini menolak pembatasan peran perempuan, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Beliau meyakini bahwa jika perempuan diberi kesempatan yang sama khususnya dalam hal pendidikan maka mereka sanggup memimpin dengan kualitas yang setara, bahkan lebih baik dari laki-laki. Pendidikan adalah pokok yang sangat signifikan, karena melalui pendidikan kita sebagai perempuan bisa meningkatkan martabat dan derajat bangsa Indonesia, dan dengan pendidikan juga tidak terbatas oleh gender, baik laki-laki maupun perempuan berhak atas akses pendidikan. Kemajuan sebuah negara tidak dapat diraih jika perempuan tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Perempuan bukanlah persaingan bagi laki-laki, akan tetapi merupakan partner yang berperan dalam memperkuat negara. Kartini percaya bahwa pendidikan dapat secara drastis meningkatkan peradaban Indonesia. Oleh sebab itu, Kartini secara tegas menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pendidikan untuk perempuan di Indonesia melalui surat-suratnya kepada teman-temannya.

Pandangan Kartini mengenai pendidikan dapat dijelaskan dalam beberapa poin. Pertama, beliau menekankan bahwa pendidikan bagi perempuan adalah dasar utama untuk membentuk karakter generasi bangsa secara menyeluruh.

Kedua, beliau menganggap bahwa pendidikan tidak satu-satunya tentang pengetahuan serta keterampilan, tetapi juga harus berfokus pada pengembangan kepribadian dan karakter yang baik. Ketiga, Kartini meyakini bahwa kemajuan sebuah negara bergantung pada kualitas pendidikannya. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berbasis gender, latar belakang, status sosial.

Kartini adalah pelopor pemikiran bahwa kemampuan seseorang untuk memimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh:

- Pendidikan
- Karakter dan moral
- Keberanian dan ketegasan
- Pemikiran yang rasional dan maju

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan bahwa perempuan berhak dan mampu menjadi pemimpin, bahkan sebagai kepala negara, apabila mereka memiliki kualitas-kualitas tersebut.

Meskipun pada masanya mustahil bagi perempuan untuk memimpin negara, Kartini sudah menanamkan benih pemikiran bahwa kekuasaan tidak boleh dimonopoli laki-laki semata. Salah satu fokus utama perjuangan Kartini adalah pendidikan perempuan. Beliau percaya bahwa hanya melalui pendidikan, perempuan bisa:

- Berpikir mandiri
- Tidak bergantung secara ekonomi maupun sosial pada laki-laki
- Mengembangkan potensi diri secara utuh
- Menjadi pemimpin dalam keluarga, masyarakat, bahkan negara

Dengan demikian, menurut Kartini kepemimpinan perempuan, bukan hanya mungkin, tapi perlu, karena perempuan yang cerdas akan membawa bangsa menjadi lebih adil, damai, dan maju. Pemikiran Kartini menjadi dasar moral dan intelektual bagi lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan Indonesia di era modern. Tanpa Kartini, mungkin tidak akan ada:

- Megawati Soekarnoputri, Presiden perempuan pertama Indonesia
- Tri Rismaharini, Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya

- Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dan tokoh ekonomi dunia
- Khofifah Indar Parawansa, Gubernur perempuan di Jawa Timur

Mereka adalah bukti nyata bahwa apa yang diperjuangkan Kartini tentang kesetaraan dan kepemimpinan perempuan kini menjadi kenyataan, termasuk dalam posisi tertinggi negara. Walaupun Kartini tidak secara langsung menulis "perempuan harus menjadi pemimpin", seluruh pemikiran, perjuangan, dan surat-suratnya mengandung nilai-nilai kesetaraan, kebebasan berpikir, dan penghargaan terhadap kemampuan perempuan. Dengan dasar itu, sangat jelas bahwa:

- Kartini mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin, termasuk dalam posisi tertinggi.
- Beliau menentang segala bentuk pembatasan yang berdasarkan jenis kelamin semata.
- Beliau percaya bahwa perempuan yang terdidik mampu membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara.

Jika Kartini hidup di masa kini, beliau hampir pasti akan menyuarakan dukungan bagi perempuan Indonesia yang menjadi presiden, gubernur, menteri, atau tokoh nasional sebagai wujud nyata dari perjuangan yang beliau rintis lebih dari seabad lalu.

Pada era Kartini, yang berlangsung antara akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, khususnya antara tahun 1879 dan 1904, posisi perempuan dalam kepemimpinan sangat terbatas akibat sistem sosial dan budaya yang patriarkal di Hindia Belanda, yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa perempuan yang mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan, baik secara langsung dalam ranah pemerintahan tradisional maupun melalui pengaruh yang mereka miliki dalam aspek budaya dan sosial di lingkungan mereka.

Meskipun Kartini hidup di zaman yang secara resmi membatasi peran perempuan, sejarah dan konteks sekitarnya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan pernah ada dan masih tetap ada dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti Ratu Kalinyamat, Nyi Ageng Serang, dan pemimpin tradisional

perempuan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa perempuan di Nusantara memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun budaya. Inilah yang menjadi dasar bagi pemikiran-pemikiran Kartini mengenai emansipasi perempuan dan pendidikan sebagai cara untuk mencapai kebebasan sejati bagi sesamanya.

Kepemimpinan perempuan dalam pemikiran Kartini penulis setuju dengan pemikiran Kartini yang mengatakan bahwa perempuan bukanlah individu yang lemah atau bodoh, melainkan mereka belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, terutama di bidang pendidikan dan pengambilan keputusan. Menurut Kartini, keberadaan pemimpin perempuan bukan hanya suatu kemungkinan, tetapi sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Kartini yakin bahwa seorang perempuan dapat menjadi pemimpin sejati jika diberikan kesempatan untuk belajar dan kebebasan berpikir. Beliau menolak pandangan sempit yang menempatkan perempuan hanya di ruang lemah. Lewat pemikirannya dan tulisannya, Kartini telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan intelektual dan moral untuk memimpin, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat dan bangsa. Beliau menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan akan menghasilkan generasi yang lebih maju, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka.

Sebagai kesimpulannya, meskipun Kartini tidak pernah secara eksplisit atau tidak secara langsung menyatakan bahwa perempuan harus menjadi pemimpin, seluruh gagasannya sudah jelas dan semangat perjuangannya mengarah pada pengakuan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin. Beliau menekankan pentingnya kesetaraan, pendidikan, dan kebebasan berpikir sebagai fondasi utama bagi kemajuan perempuan. Maka dari itu, pemikiran Kartini adalah landasan filosofis yang kuat bagi peran perempuan dalam kepemimpinan nasional dan global di masa kini maupun di masa depan. Ide-idenya telah membuka jalan bagi munculnya tokoh-tokoh perempuan yang kemudian menjadi pemimpin di berbagai bidang. Beliau memberikan inspirasi bahwa kepemimpinan perempuan adalah hal yang wajar dan sah, selama didasarkan pada potensi, tanggung jawab, dan keinginan untuk mengubah keadaan. Bagi

Kartini, pemimpin perempuan bukan sekedar simbol emansipasi, tetapi juga penggerak perubahan sosial.

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Fatimah Mernissi dan Kartini, penulis menemukan bahwa keduanya sama-sama menyuarakan pentingnya peran aktif perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam kepemimpinan. Meskipun mereka berasal dari latar sosial dan budaya yang berbeda, Mernissi dari konteks Islam-Maroko sedangkan Kartini dari Jawa pada masa kolonial Belanda. Kedua tokoh ini memiliki kesamaan dalam hal keberanian mengkritik struktur patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Mernissi maupun Kartini menekankan bahwa peran dan potensi perempuan dalam memimpin bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama maupun budaya, melainkan sejalan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks pemikiran kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin, kedua tokoh ini tidak secara langsung menyatakan perempuan boleh menjadi seorang pemimpin negara maupun masyarakat, namun analisis mendalam terhadap tulisan dan gagasan mereka menunjukkan bahwa mereka sama-sama membuka jalan menuju pengakuan terhadap kemampuan dan legitimasi perempuan untuk memimpin pada tingkatan tertinggi.

Fatimah Mernissi, seorang sosiolog dan feminis Muslim asal Maroko, membongkar narasi-narasi klasik dalam sejarah Islam yang digunakan untuk menjustifikasi inferioritas perempuan dalam kepemimpinan politik. Beliau menggunakan pendekatan historis dan kritis terhadap teks-teks keagamaan untuk menunjukkan bahwa banyak larangan terhadap kepemimpinan perempuan berasal dari interpretasi gender. Beliau menunjukkan bahwa tidak ada larangan tegas dalam Al-Qur'an yang menghalangi perempuan menjadi seorang pemimpin dan bahwa banyak narasi hadits yang digunakan untuk melarang kepemimpinan perempuan perlu dikaji ulang dari sisi otentisitas dan konteks historisnya. Dalam bukunya *"The Veil and the Male Elite"*, Mernissi mengangkat kisah-kisah perempuan yang berperan besar dalam sejarah Islam awal, termasuk perempuan-perempuan yang memimpin pertempuran atau memegang kekuasaan politik. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan

terhadap kepemimpinan perempuan lebih didasarkan pada tafsir budaya patriarkal ketimbang prinsip dasar agama.

Fatimah Mernissi mengkritik interpretasi literal dan patriarkal terhadap hadist yang sering digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Dalam karyanya yang berjudul "*Wanita di Dalam Islam*" beliau menjelaskan dengan menganalisis hadits tentang kepemimpinan perempuan. Dalam pandangannya, hadist yang menyatakan "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*" harus dipahami dalam konteks sejarah dan situasi politik tertentu, bukan sebagai larangan universal. Beliau mempertanyakan keabsahan hadist tersebut, baik dari segi sanad (rantai periwayatan) maupun konteks sejarahnya. Selain mengkritisi teks, Mernissi juga menampilkan banyak figur perempuan dalam sejarah Islam yang memainkan peran kepemimpinan penting. Beliau menyebut contoh seperti Aisyah (istri Nabi Muhammad), yang memimpin pasukan dalam perang Jamal. Ini menjadi bukti historis bahwa perempuan pernah dan bisa memimpin dalam Islam.

Relevansi Pemikiran dua Tokoh tersebut terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Politik di Indonesia pada saat ini.

Dalam sejarah perjuangan perempuan, R.A. Kartini dari Indonesia dan Fatimah Mernissi dari Maroko adalah dua tokoh pemikir besar yang sama-sama mengkritisi ketidaksetaraan gender dalam budaya dan agama. Keduanya hidup di konteks yang berbeda Kartini dalam sistem feodal kolonial di Jawa, dan Mernissi dalam masyarakat Islam patriarkal di Maroko namun sama-sama menyuarkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, berpikir mandiri, dan terlibat dalam kepemimpinan.

Di era demokrasi modern, khususnya di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam dunia politik semakin penting. Untuk itu, pemikiran kedua tokoh ini menjadi relevan sebagai fondasi intelektual dan moral dalam memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik.

Demokrasi menuntut partisipasi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan gender. Pemikiran Kartini dan Mernissi sangat relevan

untuk:

- Menolak diskriminasi terhadap perempuan dalam pencalonan politik
- Mendukung kebijakan afirmasi (seperti kuota 30% di parlemen)
- Menginspirasi perempuan untuk berani tampil sebagai pemimpin

Di Indonesia, banyak hambatan bagi perempuan untuk masuk politik bukan karena hukum, tapi karena budaya patriarki. Pemikiran Kartini dan Mernissi menekankan bahwa budaya dan tafsir agama tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan perempuan dari ruang publik, termasuk dunia politik. Kartini dan Mernissi sama-sama mengangkat nilai-nilai moral dalam kepemimpinan: empati, keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan politik modern di Indonesia yang sering diwarnai pragmatisme dan korupsi.

Relevansi pemikiran dari Fatimah Mernissi terhadap penerimaan perempuan sebagai pemimpin dalam politik di Indonesia pada demokrasi pada saat ini dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut diantaranya:

a. Dekonstruksi interpretasi agama dalam konteks lokal

Fatimah Mernissi menyoroti bagaimana tafsir agama sering dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim, isu perempuan dalam politik kerap menghadapi hambatan yang berbasis pada interpretasi agama tertentu. Pemikiran Mernissi relevan dalam mendorong tafsir yang lebih inklusif dan kontekstual, yang tidak hanya berakar pada teks agama, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan yang dijunjung oleh konstitusi Indonesia.

b. Dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam

Pemikiran Mernissi tentang kepemimpinan perempuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam memberikan landasan teologis bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk menerima perempuan sebagai pemimpin. Hal ini dapat dijadikan argumen dalam merespons

pandangan konservatif yang menolak kepemimpinan perempuan. Dalam konteks Indonesia, tokoh-tokoh perempuan seperti Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 Indonesia) dan banyak gubernur, wali kota, serta anggota parlemen perempuan yang ada di Indonesia sudah membuktikan bahwa perempuan dapat memimpin dengan efektif dan berdampak positif.

c. Sejarah peran perempuan dalam kepemimpinan

Mernissi sering menyoroiti tokoh perempuan dalam sejarah Islam, seperti Ratu Balqis, untuk menunjukkan bahwa Islam mengakui kemampuan perempuan dalam memimpin. Di Indonesia, nilai ini sejalan dengan sejarah peran penting perempuan, seperti Cut Nyak Dien dan Kartini, yang menjadi simbol perjuangan dan kepemimpinan perempuan. Pemikiran ini relevan dalam mendorong penghargaan terhadap peran perempuan dalam sejarah dan menggunakannya sebagai landasan untuk mendukung perempuan di arena politik modern.

d. Demokrasi dan keadilan gender

Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Dalam sistem demokrasi kontemporer, semua warga negara, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Pemikiran Mernissi tentang pentingnya membebaskan perempuan dari hambatan patriarki mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

e. Tantangan modern dalam politik perempuan

Pemikiran Mernissi juga relevan untuk menghadapi tantangan modern, seperti stereotip gender, diskriminasi, dan politik uang, yang sering menjadi hambatan bagi perempuan di Indonesia untuk berkiprah dalam politik. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai pemimpin. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana pendidikan politik dan

pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik.

f. Penyesuaian dengan nilai-nilai lokal

Indonesia memiliki tradisi lokal yang kaya dengan model kepemimpinan perempuan, seperti tradisi matrilineal di Minangkabau dan peran perempuan dalam adat Bugis-Makassar. Pemikiran Mernissi yang menekankan kontekstualisasi tafsir agama sejalan dengan pendekatan budaya lokal di Indonesia, di mana tradisi ini dapat diharmonisasi dengan nilai-nilai Islam untuk mendukung kepemimpinan perempuan.

Pemikiran Fatimah Mernissi memiliki relevansi yang kuat dalam mendorong penerimaan perempuan sebagai pemimpin dalam politik di Indonesia. Dengan mengkritisi tafsir agama yang patriarkal, mendukung keadilan gender, dan menyoroti sejarah peran perempuan dalam Islam, pemikiran Mernissi dapat menjadi landasan intelektual dan teologis bagi masyarakat Indonesia untuk menerima perempuan sebagai pemimpin politik. Dalam konteks demokrasi kontemporer, penerapan gagasan Mernissi membantu menguatkan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan keberagaman yang menjadi dasar bagi kemajuan politik perempuan di Indonesia.

Sedangkan relevansi pemikiran dari Kartini di masa sekarang, konsep pendidikan dan pemikiran Kartini mengenai isu kesetaraan gender jika diterapkan pada era modern ini masih sangat lah relevan. Tujuan dari pendidikan Kartini adalah menjadikan kaum perempuan yang cakap, mandiri, serta mampu mengisi peranan dengan baik di dalam masyarakat. Bagi perempuan yang sudah menikah mereka diharapkan mampu menjadi ibu yang dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya kelak. Pendidikan ini memang diperlukan sebagai upaya untuk menanamkan akhlak, budi pekerti serta memajukan pemikiran dan jasmani sang anak. Kartini memang selalu membicarakan mengenai kesetaraan di bidang pendidikan. Pemikiran Kartini sangat relevan dengan tuntutan atas pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Politik di Indonesia sudah sesuai dengan pemikiran yang dirujuk oleh Mernissi maupun Kartini dimana mereka berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin. Negara Indonesia sendiri sudah banyak tokoh perempuan yang turut andil dalam berpolitikan, membawa dirinya untuk mengabdikan terhadap masyarakat dengan kriteria pemimpin yang beliau miliki.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah perjuangan perempuan, R.A. Kartini dari Indonesia dan Fatimah Mernissi dari Maroko adalah dua tokoh pemikir besar yang sama-sama mengkritisi ketidaksetaraan gender dalam budaya dan agama. Keduanya hidup di konteks yang berbeda Kartini dalam sistem feodal kolonial di Jawa, dan Mernissi dalam masyarakat Islam patriarkal di Maroko namun sama-sama menyuarkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, berpikir mandiri, dan terlibat dalam kepemimpinan. Untuk itu, pemikiran kedua tokoh ini menjadi relevan sebagai fondasi intelektual dan moral dalam memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik.

Pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini memiliki hubungan yang kuat dengan kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia pada saat ini. Keduanya menyoroti pentingnya kesetaraan gender serta pembebasan perempuan dari tradisi patriarki yang menghalangi mereka untuk terlibat di ruang publik, termasuk dalam posisi kepemimpinan politik. Fatimah mernissi, melalui analisis yang mendalam terhadap teks-teks agama Islam, memaparkan bahwa tidak ada bukti yang secara tegas melarang perempuan untuk memegang kekuasaan, dan bahwa interpretasi gender sejauh ini lebih dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal dibandingkan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sementara itu Kartini menekankan signifikansi pendidikan dan kebebasan berpikir bagi perempuan sebagai dasar utama untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Dalam kerangka demokrasi modern yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi yang inklusif, pemikiran kedua tokoh ini sangat relevan karena memberikan dukungan moral, intelektual, bahkan spiritual bagi perempuan untuk muncul sebagai

pemimpin, termasuk dalam posisi kepala negara. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan mereka bukanlah sekedar ide-idealis masa lalu, tetapi merupakan pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara gender dalam tata kelola demokrasi.

Dalam pemikiran Mernissi dan Kartini menjadi fondasi intelektual yang memperkuat klaim bahwa perempuan memiliki kapasitas dan legitimasi untuk memegang jabatan tertinggi dalam negara. Dalam hal ini, pemikiran Mernissi dan Kartini tidak hanya relevan, tetapi sangat dibutuhkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia tanpa keterwakilan perempuan yang adil, terutama di tingkat eksekutif tertinggi, adalah negara yang cacat. Dengan kata lain, ketika perempuan masih dianggap tidak layak atau tidak sah menjadi seorang pemimpin hanya karena gendernya, maka demokrasi masih belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Pemikiran kedua tokoh ini mengajak kita untuk merenungi ulang bahwa kesetaraan bukanlah pemberian, melainkan keharusan moral dan logis dari sistem politik yang mengklaim dirinya sebagai demokratis.

Melihat beberapa contoh pemimpin perempuan di Indonesia, tampak jelas bahwa perempuan Indonesia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memimpin di berbagai sektor dan dapat memberikan pengaruh signifikan bagi masyarakat. Tokohnya seperti Megawati Soekarnoputri, yang pernah menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang kelima, memperlihatkan bahwa perempuan dapat menduduki posisi puncak dalam pemerintahan serta berperan signifikan dalam memelihara stabilitas politik nasional. Disamping, itu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan telah diakui di tingkat Internasional karena kepemimpinannya dalam bidang ekonomi dan reformasi fiskal, membuktikan bahwa perempuan Indonesia juga dapat bersaing dan diakui secara global. Tri Rismaharini, mantan Walikota Surabaya sekaligus Menteri Sosial, juga memamerkan kepemimpinan yang tangguh dan penuh empati dalam menangani masalah-masalah sosial dan perkotaan. Keberhasilan individu-individu ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki kemampuan, pandangan, dan keberanian untuk memimpin dengan efektif, serta dapat

membawa perubahan positif yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin perempuan di Indonesia bukan sekedar lambang kesetaraan gender, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi penggerak perubahan yang penting dalam masyarakat dan pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul Kepemimpinan Perempuan Menurut Pandangan Pemikiran Fatimah Mernissi Dan R.A Kartini yang telah di uraikan, penulis menyimpulkan bahwa: Fatimah Mernissi dan R.A. Kartini memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya peran dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, meskipun berasal dari konteks sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Keduanya menolak sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi dibawah laki-laki, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. R.A. Kartini lebih menekankan pada pentingnya pendidikan sebagai pintu masuk perempuan menuju kebebasan berpikir dan kepemimpinan. Beliau meyakini bahwa perempuan yang terdidik memiliki kapasitas untuk memimpin dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Sedangkan Fatimah Mernissi menolak interpretasi literal dan patriarkal terhadap hadits yang sering digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Dalam pandangannya, hadits seperti *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”* harus dipahami dalam konteks sejarah dan situasi politik tertentu, bukan sebagai larangan universal. Mernissi juga berpendapat bahwa Al-Qur’an tidak memberikan larangan terhadap perempuan untuk memimpin, bahkan memberikan penghormatan terhadap tokoh perempuan pemimpin seperti Ratu Balqis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas dan kapasitas individu.

Keduanya memiliki pandangan progresif yang saling melengkapi, Kartini berangkat dari pengalaman kolonial dan budaya Jawa, sementara Mernissi dari perspektif kritis terhadap pemahaman keislaman yang patriarkal. Keduanya sepakat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal

kepemimpinan, termasuk dalam ranah politik dan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini, pemikiran kedua tokoh tersebut tetap sangat relevan. Perempuan Indonesia telah mulai mendapatkan ruang dalam politik, namun tantangan struktural dan kultural masih kuat. Oleh karena itu, pemikiran Kartini dan Mernissi dapat dijadikan landasan moral dan filosofis dalam mendorong kesetaraan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran Fatimah Mernissi dan R.A Kartini sangat relevan dalam konteks keterlibatan perempuan sebagai pemimpin dalam politik di Indonesia pada demokrasi saat ini, termasuk di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Mernissi juga menunjukkan bahwa sejarah Islam sendiri kaya dengan contoh perempuan yang menjadi pemimpin dan tokoh penting, seperti Ratu Balqis dan Aisyah binti Abu Bakar, sama halnya dengan Kartini juga menunjukkan bahwa di Indonesia juga terdapat beberapa contoh perempuan yang menjadi pemimpin. Contoh-contoh ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk memimpin, asalkan diberi kesempatan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif. *Jurnal Uin Mataram*, 52.
- Aramina. (2023). Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 56.
- Aramina, M. C. (2023). Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan. *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Hal 56.
- Arikunto. (2012). Metodologi Penelitian Dalam Olahraga. *Unesa University Press*.

- Ariziq, B. L. (2022). Kedudukan Dan Kondisi Perempuan Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam. *Jurnal Keislaman, Volume 5, Nomor 1*, 6-7.
- Asif Trisnani, W. W. (2021). Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2.
- Asmani, J. M. (2015). Kepemimpinan Perempuan. *Addin, Vol 9 No 1*, 44-45.
- Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Penelitian*, 44.
- Azm, L. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif. *Jurnal Uin Mataram*, 53-54.
- Dedi Susanto. (2023). Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 56-57.
- Dewi Fitriya, D. (2021). *Prophetic Leadership Perspektif Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Farida, M. M. (2005). Perempuan Dan Politik. *Gramedia Pustaka Utama*, 49-50.
- Gadar, E. R. (2021). Kepemimpinan Megawati.
- Halimatuzzahro. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif. *Journal Unisamuh*, 87-95.
- Hanyfah, S. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif. *Universitasi Indraprastai Pgri*, 340.
- Hutahaean, W. S. (2020). *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*. Kota Malang: Ahlimedia.
- Jamhari. (2018). Fatimah Mernissi, Perempuan Berpeluang Sebagai Kepala Negara. *Jsa, No 2*, 125-126.
- Katimin, D. (2018). *Hadist-Hadist Politik*. Medan: Perdana Publishing.
- Kusuma, A. D. (2022). Kartini Dan Pemikirannya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 285.
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah. *Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol II, No 1*, 34-35.
- Mernissi, F. (1994). *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*. Bandung: Mizan.
- Mernissi, F. (1994). *Wanita Di Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mernissi, F. (2003). Penafsiran Feminis Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam. 46.
- Nurhalim. (2023). Konsep Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 1 Hal 5-10*.

- Oktaviana, D. D. (2024). Studi Analisis Peran Wanita Dalam Islam (Pemikiran Fatimah Mernissi). *Fakultas Syari'ah*, 17.
- Rahmatunnur, S. (2023). Pandangan Fatima Mernissi Tentang Kepemimpinan. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Volume 18, No 1 Hal. 56.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Uin Imam Bonjol Padang*, Hal 43.
- Subhan, Z. (2004). Kodrat Perempuan, Takdir Atau Mitos. *Pustaka Pesantren*, 4-8.
- Sunarso, B. (2023). *Teori Kepemimpinan*. Yogyakarta: Cv. Madani Berkah Abadi.
- Sutiono. (2020). Pendidikan Perempuan Sebelum Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq-Pai-Fai-Uia*, Hal 123.
- Tina. (2023). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Fatimah Mernissi)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin.
- Tolu, D. N. (2023). Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Menurut Pandangan Islam, Studi Pemikiran Fatimah Mernissi. *Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, Volume 2 No 01, 25-26.
- Wahidah, N. (2024). Sejarah Pergerakan Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 14-15.
- Waruwu, M. (2023). Pendidikan Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

